

**PERENCANAAN STRATEGIS SISTEM INFORMASI
UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PENGENDALIAN PENGGUNAAN
DANA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT
(Studi Kasus: Konsultan PNPM-MP Kabupaten Bandung)**

Oleh:

Denny Rusdianto

E-Mail: denny.rusdianto@gmail.com

ABSTRAK

Dalam penelitian ini, penulis merumuskan perencanaan strategik dimana agar sistem informasi dapat digunakan sebagai satu alat yang dapat mendukung keberhasilan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Kabupaten Bandung khususnya dalam pengendalian penggunaan dana stimulan yang disebut dengan dana bantuan langsung masyarakat (BLM.)

Perencanaan strategi SI dilakukan dengan dua metodologi. Pertama menggunakan metodologi pemaduan strategis (strategic alignment) dan Kedua menggunakan metodologi dampak kompetitif (competitive impact). Alat bantu yang digunakan dalam analisis di penelitian ini yaitu Analisis SWOT, Analisis PEST, dan Critical Success Factor (CSF). Hasil akhir Perencanaan strategis sistem informasi ini adalah blueprint portofolio aplikasi untuk masa mendatang yang mengidentifikasi adanya kebutuhan sistem informasi yang meliputi 4 aplikasi strategis, 2 aplikasi operasional, 2 aplikasi pendukung, dan 2 aplikasi potensi tinggi.

Kata Kunci : perencanaan strategi, pemaduan strategis, dampak kompetitif, Analisis SWOT, Analisis PEST, *critical success factor*, portofolio aplikasi

*Denny Rusdianto/
Perencanaan Strategis Sistim Informasi Untuk Meningkatkan Kualitas Pengendalian
Penggunaan Dana Bantuan Langsung Masyarakat
(Studi Kasus: Konsultan Pnpm-Mp Kabupaten Bandung)*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) merupakan program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Beberapa kendala dan hambatan dalam pemanfaatan informasi yang berhubungan dengan penggunaan dana BLM masih banyak ditemui, seperti pelaksanaan penggunaan dana bantuan masyarakat (BLM) belum bisa “*tepat guna, tepat sasaran dan tepat waktu*”, Laporan atau informasi progres penggunaan dana dari mulai tahapan pencairan dana ke BKM, pemanfaatan dana oleh KSM dan sampai ke laporan pertanggungjawabannya belum bisa disampaikan dengan kualitas yang baik kepada lingkungan internal konsultan kabupaten dan para stakeholder, Hasil analisis mengenai seberapa besar dampak program ini terhadap masyarakat miskin belum bisa didapatkan dengan pasti, atau dengan kata lain apakah sudah “*tepat guna dan tepat sasaran?*”.

Untuk kepentingan tersebut diatas, maka PNPM-MP Kabupaten Bandung perlu melakukan langkah strategis dalam perencanaan strategis sistim informasi antara lain dengan cara menyusun suatu perencanaan strategis melalui tahapan sebagai berikut; menganalisis keadaan bisnis dan sistim informasi yang ada saat ini dengan menggunakan metodologi Pemaduan strategis (*Strategic Alignment*) dan metodologi Analisis dampak kompetitif (*Competitive Impact*) yang menggunakan alat bantu analisis seperti analisis SWOT, Analisis PEST, dan *Critical Success Factor (CSF)* dan terakhir adalah analisis portofolio aplikasi sesuai dengan grid Mc Farlan yang menghasilkan suatu *blueprint* portofolio aplikasi untuk kemajuan bisnis di masa depan.

1.2 Rumusan dan Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pemetaan kondisi saat ini di PNPM-MP Kabupaten Bandung meliputi Sistim Informasi Manajemen dan Pemetaan organisasi?

2. Bagaimana keadaan lingkungan internal dan eksternal Konsultan PNPM-MP Kabupaten Bandung yang meliputi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman?
3. Apa yang menjadi faktor-faktor sukses keberhasilan?
4. Bagaimana Perencanaan Strategis Pengembangan Sistem Informasi Manajemen di Konsultan PNPM-MP Kabupaten Bandung dengan hasil akhir berupa *blueprint* portofolio aplikasi untuk masa mendatang?

1.3 Hasil Penelitian

Hasil yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Adanya sebuah konsep, gambaran dan petunjuk bagi pihak manajemen untuk rencana strategis pengembangan sistem informasi.
2. Adanya peningkatan pelayanan terhadap kebutuhan, baik dari pihak konsultan maupun para stakeholder, dalam hal penyajian informasi yang bernilai dan berkualitas sesuai dengan harapan organisasi. Terutama dengan adanya *blueprint* portofolio aplikasi untuk masa mendatang.
3. Mulai dilakukannya pembenahan proses bisnis yang ada pada setiap bagian kerja di lingkungan Konsultan PNPM-MP Kabupaten Bandung, untuk mendukung proses pengembangan sistem informasi ke depan.

II. METODOLOGI DAN OBJEK PENELITIAN

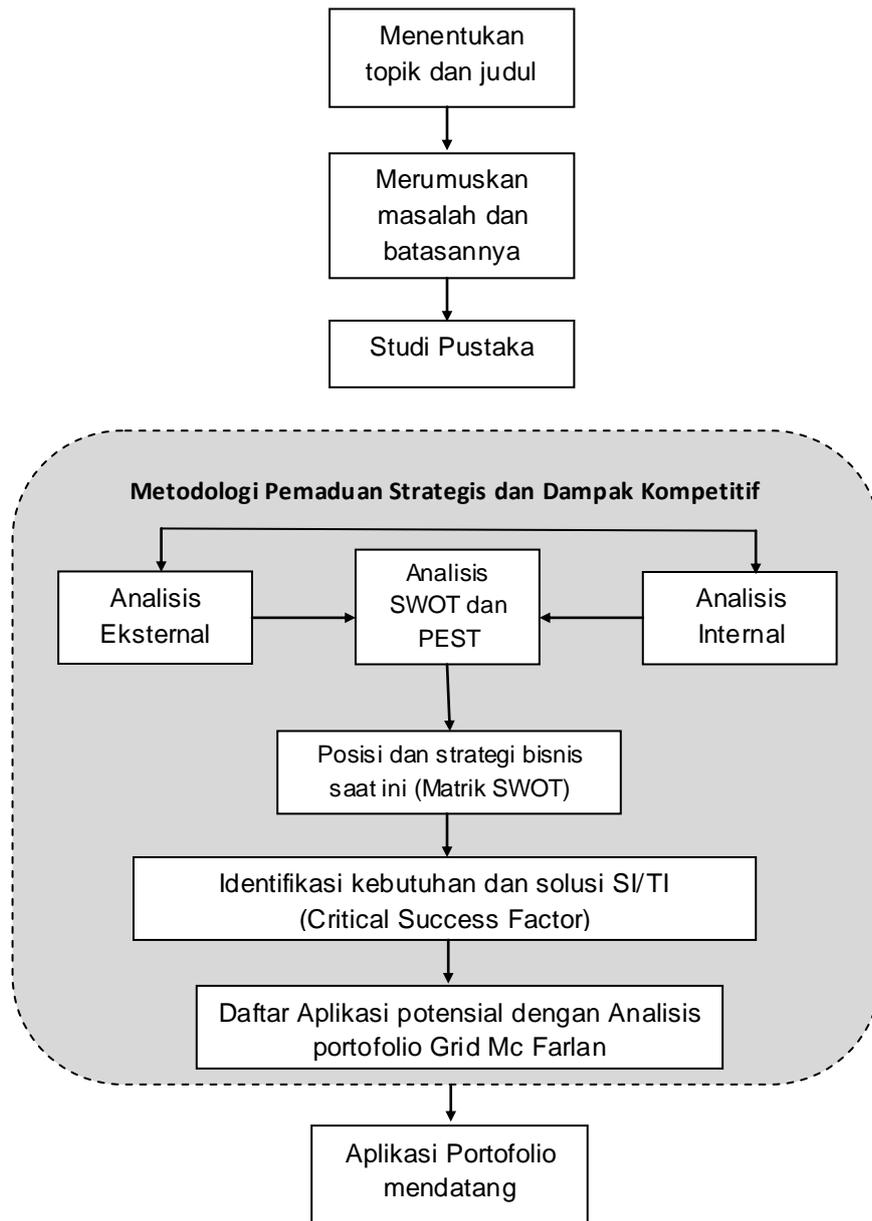
1. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan berupa tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses penyusunan tesis ini mulai dari awal pemetaan kondisi saat ini sampai ke perencanaan strategis yang menghasilkan *blueprint* portofolio aplikasi masa mendatang.

Proses awal dimulai dari pemilihan topik dan judul penelitian, penentuan masalah dan batasannya, studi pustaka, analisis proses bisnis saat ini (*untuk tahap pencairan, pemanfaatan/penggunaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana BLM*). Analisis pepaduan strategi (*Strategic Alignment*) dengan alat bantu SWOT Analysis (*Strength, Weakness, Opportunity, Threats*) dan Analisis PEST (*Politik, Ekonomi, Sosial dan Teknologi*) untuk menentukan posisi organisasi atau strategi bisnis saat ini. Dan dilanjutkan dengan pengidentifikasian kebutuhan Sistem Informasi dengan metodologi dampak kompetitif (*Competitive impact*) yang menggunakan alat bantu Analisis *Critical Success Factor (CSF)*. Tahap akhir adalah

*Denny Rusdianto/
Perencanaan Strategis Sistem Informasi Untuk Meningkatkan Kualitas Pengendalian
Penggunaan Dana Bantuan Langsung Masyarakat
(Studi Kasus: Konsultan Pnpm-Mp Kabupaten Bandung)*

melakukan analisis portofolio aplikasi, untuk mengkategorikan kebutuhan sistem informasi dengan matrik grid Mc Farlan, yang meliputi kategori aplikasi strategis, operasional utama, pendukung, dan potensi tinggi. Hasil akhir tentunya didapatkan blue print portofolio aplikasi untuk masa mendatang.



Gambar 1. Metodologi Penelitian

2. Objek Penelitian

PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten Bandung memiliki wilayah dampungan di 20 kecamatan di 171 Desa/Kelurahan. Untuk dapat memastikan pelaksanaan PNPM MP di masyarakat dengan baik, maka melibatkan tenaga konsultan pendamping. Saat ini jumlah tenaga konsultan PNPM MP Kabupaten Bandung mencapai 103 orang, yang dipimpin oleh Koordinator Kabupaten (*Korkab*) dan dengan komposisi 11 orang konsultan di tingkat kabupaten dan 92 orang di tingkat kecamatan dan Desa/Kelurahan. Konsultan di Kabupaten Korkab dibantu oleh asisten korkab (*askot*) dibidang Infrastruktur, Comunity Development, Manajemen Keuangan dan Manajemen Data.

3. Karakteristik Proses Bisnis

Efisiensi suatu proses bisnis dan kemampuannya untuk menghasilkan apa yang diinginkan pelanggan, sangat kuat dipengaruhi oleh karakteristik proses bisnis yang meliputi Derajat Struktur, Rentang Keterlibatan, Tingkat Integrasi, Ritme, dan Kompleksitas. Hal ini sesuai dengan pendapat Steven Alter, *“The efficiency of a business process and its ability to produce what the customers want are strongly influenced by process characteristics including the degree of structure, the range of involvement, the level of integration, rhythm, and complexity”*. (Steven Alter, 2002).

Karakteristik dari proses bisnis di PNPM Mandiri Perkotaan dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	Indikator Karakteristik	Nilai	Keterangan
1	Derajat Struktur	Terstruktur	Proses Bisnis sudah sesuai dengan Buku Pedoman Umum PNPM-MP
2	Rentang Keterlibatan	Besar	Melibatkan Faskel, SF, Koor BKM, KSM, Askot, Korkab dan Satker
3	Tingkat Integrasi	Baik	Hasil pekerjaan dari satu bagian bisa menjadi masukkan untuk bagian yang lain tanpa harus mengulang pekerjaan yang serupa.
4	Ritme Proses	Periodik	Dilakukan setiap tahun anggaran, antara Bulan Juli - Desember
5	Kompleksitas	Komplek	Melibatkan banyak pihak; Pendampingan Faskel dalam pembentukan BKM/KSM; Pelatihan pembuatan proposal & LPJ bagi Faskel & KSM.
6	Ketergantungan pada Mesin	Rendah	BKM, KSM bahkan sampai PJOK masih belum optimal dalam penggunaan aplikasi komputer seperti: Ms. Word, Ms. Excel dan E-mail.

*Denny Rusdianto/
Perencanaan Strategis Sistem Informasi Untuk Meningkatkan Kualitas Pengendalian
Penggunaan Dana Bantuan Langsung Masyarakat
(Studi Kasus: Konsultan Pnpm-Mp Kabupaten Bandung)*

NO	Indikator Karakteristik	Nilai	Keterangan
7	Keunggulan Perencanaan dan Pengendalian	Baik	Perencanaan dan Pengendalian proses bisnis dilakukan setelah adanya kepastian DIPA, Daftar lokasi Alokasi dan POK dari Pemerintah Pusat.
8	Perhatian terhadap kesalahan dan kelalaian	Sedang	Masih perlu ditingkatkan, terutama dalam verifikasi proposal dan LPJ, apakah sudah Tepat Sasaran, Tepat Guna dan Tepat Waktu?

Tabel 1. Karakteristik Proses Bisnis PNPM MP – Kab Bandung

III. ANALISIS DAN PERENCANAAN STRATEGIS SISTEM INFORMASI

1. Analisis Faktor Internal

Dari hasil analisis faktor internal ini, dapat diketahui faktor-faktor kekuatan dan kelemahan yang ada di lingkungan dalam organisasi seperti yang tersaji dalam tabel-tabel dibawah ini:

NO	KEKUATAN (Strength)
1	Merupakan salah satu program andalan pemerintah pusat untuk penanggulangan kemiskinan dengan metode pemberdayaan masyarakat.
2	Memiliki Sumber Daya Manusia (tenaga konsultan) yang terampil
3	Memiliki Buku Pedoman Pelaksanaan dan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan.
4	Adanya Dana BLM yang bersumber dari APBN dan APBD yang merupakan dana stimulan.
5	Adanya Daftar Lokasi dan Alokasi Dana BLM dari Menkokesra di setiap tahun anggarannya.
6	Adanya data demografi penduduk dari Podes dan PPLS.
7	Produk yang dihasilkan dalam penggunaan dana BLM harus menyentuh di tiga sektor (<i>tridaya</i>) yaitu pembangunan di sektor lingkungan, sosial dan ekonomi.
8	Pengawasan penggunaan dana BLM yang transparan dan akuntabilitas.
9	Lokasi sekretariat PNMP-MP Kabupaten Bandung yang strategis (ditengah-tengah 171 wilayah desa/kelurahan dampingan).

Tabel .2 Analisis Kekuatan PNPM – MP Kabupaten Bandung

NO	KELEMAHAN (Weakness)
1	Terbatasnya pagu anggaran dana BLM yang diterima oleh desa/kelurahan
2	Nilai pagu anggaran tiap kecamatan atau desa masih bersifat Top-Down

NO	KELEMAHAN (Weakness)
3	Data demografi penduduk dari Podes dan PPLS tidak dalam bentuk hardcopy, melainkan dalam bentuk soft-file excel.
4	Petunjuk Operasional Kegiatan terlambat terbit.
5	Pengarsipan terhadap dokumen-dokumen penting belum baik.
6	Penggunaan sarana komputer belum optimal.
7	Aplikasi Sistem Informasi yang ada hanya untuk entry data.
8	Format data isian yang terlalu kompleks dan belum bisa mengintegrasikan kebutuhan data di tingkatan konsultan kabupaten
9	Penanganan keluhan belum dapat ditindak lanjuti dengan cepat

Tabel 3. Analisis Kelemahan PNPM – MP Kabupaten Bandung

2. Analisis Faktor Internal

Dari hasil analisis faktor eksternal ini, dapat diketahui faktor-faktor peluang dan ancaman yang bersumber dari luar organisasi seperti yang tersaji dalam tabel-tabel dibawah ini:

NO	PELUANG (Opportunity)
1	Dukungan dari masyarakat yang sangat baik terhadap PNPM MP
2	Potensi sumber daya di masyarakat (sumber daya alam, keterampilan dan usaha kecil) yang banyak.
3	Mengakses dana pemerintah dari program lain dengan nilai anggaran perdesa yang lebih besar dibanding dengan dana BLM.
4	Mengakses dana dari pihak lain (<i>swasta</i>) dengan cara channelling.
5	Forum BKM/LKM yang terkordinir dengan baik.
6	Teknologi informasi yang semakin berkembang

Tabel 4. Analisis Peluang PNPM – MP Kabupaten Bandung

NO	ANCAMAN (Threat)
1	Kualitas SDM di Masyarakat desa/kelurahan masih rendah
2	Pola penggunaan dana BLM masih banyak bersifat bagi rata
3	Partisipasi swadaya masyarakat dalam hal tenaga maupun dana masih rendah
4	Rencana Tahunan (Renta) dan Program Jangka Menengah (PJM) belum bersinergi dengan PJM Desa/Kelurahan.
5	Kontrol terhadap progres penggunaan dana BLM oleh pemda di tingkat kecamatan dan kelurahan masih rendah.
6	Pesaing dari desa/kelurahan di kabupaten lain untuk mengakses dana yang lebih besar dari program lain.
7	Adanya dana partisipatif dari para anggota dewan, serta adanya pemilu kepala daerah di tingkat desa/kelurahan.

Tabel 4.4 Analisis Ancaman PNPM – MP Kabupaten Bandung

*Denny Rusdianto/
Perencanaan Strategis Sistem Informasi Untuk Meningkatkan Kualitas Pengendalian
Penggunaan Dana Bantuan Langsung Masyarakat
(Studi Kasus: Konsultan Pnpm-Mp Kabupaten Bandung)*

3. Analisis SWOT

Analisis *Strength Weakness Oppurtunity Threat* (SWOT) dengan menggunakan matrik SWOT merupakan alat yang cocok untuk membantu mengetahui kondisi organisasi dan bisnis saat ini dalam membantu dalam mengembangkan empat tipe strategi untuk mencapai tujuan jangka pendek maupun jangka panjang organisasi yang lebih baik.

Berikut ini adalah penjelasan dan tabel matriks SWOT dari empat tipe strategi dalam analisis SWOT.

a. Startegi Kekuatan dan Peluang (*Strength and Opportunity - SO*)

Strategi untuk memanfaatkan peluang dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki oleh organisasi.

b. Strategis Kelemahan dan Peluang (*Weakness and Opportunity - WO*)

Strategi untuk memanfaatkan peluang eksternal yang muncul dari lingkungan dengan tujuan mengatasi kelemahan.

c. Strategis Kekuatan dan Ancaman (*Strength and Threat - ST*)

Strategi untuk menghadapi dan mengatasi ancaman dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki oleh organisasi.

d. Strategis Kelemahan dan Ancaman (*Weakness and Threat - WT*)

Strategi menghindari ancaman untuk melindungi dari kelemahan yang ada di lingkungan internal organisasi.

Strategi S - O	Strategi W - O
1. Peningkatan kualitas SDM di BKM seperti: pelatihan pembuatan proposal, LPJ, penggunaan aplikasi ms. Office. (S: 1,2,3,9) (O: 1,2,5) 2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BKM, sehingga kualitas penggunaan dana BLM bisa lebih baik. (S: 3,4,5,6,7,8) (O: 1,2,3,4) 3. Menjaln kerjasama dengan pihak swasta. (S: 2,7,8) (O: 2,5,6) 4. Meningkatkan pemanfaatan	1. Perencanaan anggaran yang bersifat bottom-up, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (W: 1,2,3,4) (O: 1.2.5) 2. Mengundang pihak lain untuk memberikan pelatihan kearsipan dan membangun sistim informasi yang terintegrasi antar bagian (W: 3,6,7,8,9) (O: 1,2,3,4,6)

Strategi S - O	Strategi W - O
SI/TI (S: 2,6) (O: 2,3,4,6)	
Strategi S - T	Strategi W - T
1. Memperkuat pemahaman masyarakat terhadap dasar pelaksanaan PNPM. (S: 1,2,3,7) (T: 1,2,3,6) 2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan pemda. (S: 1,2,3,4,5,6,8,9) (T: 4,5,7) 3. Peningkatan kualitas dan distribusi pelaporan penggunaan dana BLM secara periodik. (S: 2,3,8) (T: 4,5,6,7) 4. Mengadakan kegiatan studi banding ke kabupaten lain. (S: 2,7,8,9) (T: 1,2,3,4,5,6,7)	1. Meningkatkan budaya tertib administrasi dan tata kelola arsip/dokumen yang lebih baik. (T: 1,2,3,4) (W: 3,4,5) 2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan pemda. (T: 4,5,7) (W: 1,2,3,4,9) 3. Meningkatkan layanan konsultasi dan bimbingan dari pihak konsultan (fasilitator) terhadap masyarakat. (T: 1,2,3,4,5,6,7) (W: 1,3,4,5,6) 4. Membangun aplikasi sistim informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan penggunaan dana BLM. (T: 2,4,5,6) (W: 3,5,6,7,8,9)

Tabel 5. Strategi Bisnis hasil analisis SWOT

4. Analisis PEST

a. Faktor Politik

- 1) Merupakan salah satu program andalan pemerintah pusat untuk menanggulangi kemiskinan.
- 2) Kelangsungan program sampai 2014, karena merupakan program andalan pemerintahan presiden saat ini. Kelanjutan program tergantung pada presiden terpilih yang akan datang.
- 3) Suhu politik antara tahun 2012-2013 yang meningkat, karena banyaknya pemilihan kepala daerah di tingkat desa/kelurahan. Di beberapa desa berdampak pada pelaksanaan kegiatan di masyarakat terlambat dan adanya politisasi terhadap PJM BKM.

b. Faktor Ekonomi

- 1) Harga bahan baku untuk pelaksanaan kegiatan infrastruktur di tiap desa berbeda-beda.
- 2) Harga bahan baku pada saat pelaksanaan kegiatan infrastruktur kadang terjadi perubahan/kenaikan dibanding pada saat proposal diajukan.

c. Faktor Sosial

*Denny Rusdianto/
Perencanaan Strategis Sistim Informasi Untuk Meningkatkan Kualitas Pengendalian
Penggunaan Dana Bantuan Langsung Masyarakat
(Studi Kasus: Konsultan Pnpm-Mp Kabupaten Bandung)*

- 1) Masyarakat desa/kelurahan masih berpola pikir bahwa bantuan bersifat langsung, tanpa ada keterlibatan dari warga untuk berswadaya baik tenaga maupun uang.
- 2) Masyarakat desa/kelurahan yang sudah lebih modern, tingkat kegotongroyongannya sudah berkurang.
- 3) Potensi alam dan keterampilan masyarakat di desa/kelurahan belum tergali dan dimanfaatkan secara maksimal terutama untuk terciptanya lapangan kerja baru.

d. Faktor Teknologi

- 1) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin cepat, akan sangat membantu jika dapat membangun suatu sistim informasi yang baik.
- 2) Adanya web e-Monitoring (e-Mon) di pemda kabupaten untuk memantau informasi progres pencairan dana BLM dan pelaksanaan fisik kegiatan.
- 3) Di tingkat desa/kelurahan sudah ada fasilitas RW-net
- 4) Masih banyak pegawai di tingkat pemerintah kabupaten sampai desa/kelurahan yang belum dapat menggunakan sarana komputer.

Tabel 6. Analisis CSF dan Identifikasi Kebutuhan SI (Prespektif Keuangan)

Sasaran	Kriteria Sukses	Tindakan CSF	Kebutuhan Sistem Informasi
Meningkatkan kualitas pengendalian penggunaan dan pemanfaatan dana BLM secara transparan dan akuntabel (Prespektif Keuangan)	Dana BLM PNPM dipastikan ada untuk Kabupaten Bandung meliputi lokasi - alokasinya di 20 kecamatan dan 171 desa/kelurahan.	Memastikan dokumen penting untuk pencairan dana BLM telah diterima satker pemda kabupaten Bandung, seperti DIPA dari Mentri Keuangan dan Daftar Lokasi & Alokasi BLM PNPM dari Menko Kesra.	Sistim Informasi Pencairan BLM untuk mengelola data SPM dan SP2D sebagai bukti dana sudah diterima
	Dana BLM PNPM dipastikan diterima di 171 desa melalui BKMLKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan besarnya pagu BLM per Desa berdasarkan data podes dan tabel syarat Alokasi BLM. 2. Memastikan Desa penerima dana BLM telah mengetahui syarat untuk menerima BLM, seperti Akta notaris pembentukan BKM, rekening bank dengan 3 specimen dan KSM terbentuk. 	Sistim Informasi BKM dan KSM untuk mengelola data BKM dan KSM meliputi: data potensi desa, data pembentukan BKM, data anggota BKM, data rekening BKM, data pagu BLM perdesa beserta nilai untuk Biaya Operasional (BOP), data pelatihan BKM dan data KSM.
	Total nilai pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan total pagu BLM (<i>tidak boleh lebih dan kurang</i>).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memeriksa dan memvalidasi terhadap kelengkapan proposal kegiatan yang diajukan oleh BKM, seperti data Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) . 	Sistim informasi penggunaan BLM untuk mengelola data proposal yang diajukan dan LPJ, meliputi: data RPD, RAB, Laporan penggunaan dana, data foto progres kegiatan 0% - 50% - 100% dan titik kordinat lokasi kegatan.
	Nilai Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) penggunaan dana BLM harus sesuai dengan proposal yang diajukan.	<ol style="list-style-type: none"> 2. Memastikan proposal layak, mendapat rekomendasi dari pihak konsultan dan satker untuk pengambilan dananya. 3. Memastikan LPJ yang dilaporkan 	

Tabel 6. Analisis CSF dan Identifikasi Kebutuhan SI (Prespektif Keuangan)

Sasaran	Kriteria Sukses	Tindakan CSF	Kebutuhan Sistem Informasi
		lulus pemeriksaan dan total nilainya sesuai dengan proposal yang diajukan.	
	Mengakses dana dari sumber lain, selain dana BLM (<i>channeling dengan pihak lain</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjalin kemitraan dengan pihak swasta dan dengan dinas-dinas di lingkungan pemda selain satker pemda. 2. Berkompetisi untuk mendapatkan dana yang lebih besar dari pemerintah pusat. 	Sistem Informasi Channeling untuk pengelolaan data kemitraan, meliputi: data pihak swasta, data dinas-dinas pemberi bantuan dan data kabupaten pesaing.

Tabel 7. Analisis CSF dan Identifikasi Kebutuhan SI (Prespektif Pelanggan)

Sasaran	Kriteria Sukses	Tindakan CSF	Kebutuhan Sistem Informasi
Kepuasan masyarakat terhadap kualitas hasil pekerjaan yang didanai oleh BLM (Prespektif Pelanggan)	Pelaksanaan kegiatan meliputi tiga bidang (<i>tridaya</i>) yaitu: bidang infrastruktur, sosial dan ekonomi.	Memastikan proposal kegiatan yang diajukan sudah meliputi tiga bidang, seperti: rehab rumah (infrastruktur), pinjaman bergulir (ekonomi), dan sarana posyandu (sosial)	Sistem informasi penggunaan BLM untuk mengelola data proposal yang diajukan dan LPJ, meliputi: data RPD, RAB, Laporan penggunaan dana, data foto progres kegiatan 0% - 50% - 100%, data titik kordinat lokasi kegiatan dan data penerima manfaat.
	Pelaksanaan kegiatan harus tepat sasaran dan tepat guna.	1. Memastikan proposal kegiatan yang diajukan merupakan prioritas utama dan hasil kesepakatan masyarakat berupa Berita Acara Prioritas Pelaksanaan Usulan Kegiatan	

Tabel 6. Analisis CSF dan Identifikasi Kebutuhan SI (Prespektif Keuangan)

Sasaran	Kriteria Sukses	Tindakan CSF	Kebutuhan Sistem Informasi
		(BAPPUK). 2. Memastikan penerima manfaat atau bantuan adalah warga miskin.	
	Kualitas hasil pekerjaan infrastruktur minimal bertahan selama 5 tahun	Melakukan uji petik terhadap pelaksanaan infrastruktur di masyarakat.	
	Kualitas hasil pekerjaan sosial dan ekonomi bisa membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Melakukan uji petik terhadap pelaksanaan kegiatan ekonomi dan sosial di masyarakat.	
	Adanya sarana untuk memfasilitasi keluhan atau pengaduan dari masyarakat	Melakukan tanggapan dan perbaikan dengan cepat terhadap keluhan yang di sampaikan masyarakat.	Sistim Informasi Pengaduan Masyarakat untuk mengelola data keluhan dan respon yang telah dilakukan.

Tabel 8 Analisis CSF dan Identifikasi Kebutuhan SI (Prespektif Proses Bisnis Internal)

Sasaran	Kriteria Sukses	Tindakan CSF	Kebutuhan Sistem Informasi
ketepatan dalam penyelesaian pekerjaan yang berhubungan dengan pencairan dan	Komitmen bersama dari pimpinan puncak organisasi dan para pegawainya untuk membuat pelaporan	1. Penyampaian visi dan misi organisasi yang jelas dan terarah. 2. Adanya rapat aktif dan terjadwal untuk mengevaluasi hasil pekerjaan.	1. Sistim Informasi pencairan BLM. 2. Sistim Informasi penggunaan BLM.

*Perencanaan Strategis Sistem Informasi Untuk Meningkatkan Kualitas Pengendalian Penggunaan Dana Bantuan Langsung Masyarakat
(Studi Kasus: Konsultan Pnpm-Mp Kabupaten Bandung)*

Tabel 8 Analisis CSF dan Identifikasi Kebutuhan SI (Prespektif Proses Bisnis Internal)

Sasaran	Kriteria Sukses	Tindakan CSF	Kebutuhan Sistem Informasi
penggunaan dana BLM dan pelaporan berbasis SIM (Prespektif Proses Bisnis Internal)	pencairan dan penggunaan dana BLM berbasis Sistem Informasi Manajemen	<ol style="list-style-type: none"> 3. Respon cepat terhadap keluhan dari masyarakat. 4. Memeriksa dan mengevaluasi kehadiran konsultan di desa/kelurahan. 5. Memberikan penundaan bahkan pemotongan honor konsultan jika berkinerja tidak baik. 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Sistem Informasi BKM dan KSM. 4. Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat. 5. Sistem Informasi Channeling. 6. Sistem Informasi Kepegawaian untuk mengelola data pegawai konsultan PNPm Kabupaten, meliputi: data pribadi, pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, rotasi, mutasi, promosi dan degradasi
	Adanya proses verifikasi yang berjenjang terhadap proses pencairan dan penggunaan dana BLM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan Buku Pedoman PNPm dimiliki oleh Konsultan dan BKM. 2. Memastikan adanya bukti hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Koordinator BKM, fasilitator dan askot, serta sesuai dengan soft-file. 	7. Sistem Informasi Penggajian untuk mengelola gaji konsultan, meliputi: data kehadiran kerja, data penilaian kinerja konsultan, data grade honor, data potongan.
	Entry dan pengiriman data dapat dilakukan dengan mudah dan cepat	Format isian data yang sederhana dan dapat memenuhi kebutuhan masukan data bagi seluruh bagian di internal organisasi (Korkab, Askot dan Fasilitator)	8. Web-Site PNPm Kabupaten Bandung.
	Sistem pelaporan progres pencairan dan penggunaan dana BLM yang berkualitas	Pelaporan harus berbasis SIM.	
	Kegiatan yang tertuang di Renta PJM dapat bersinergi	1. Mengadakan koordinasi aktif dan terjadwal antara konsultan dengan	Sistem Informasi Program Jangka Menengah (PJM) untuk

Tabel 8 Analisis CSF dan Identifikasi Kebutuhan SI (Prespektif Proses Bisnis Internal)

Sasaran	Kriteria Sukses	Tindakan CSF	Kebutuhan Sistem Informasi
	dengan PJM yang dibuat oleh pemda tingkat desa/kelurahan.	satker, melalui musrenbang. 2. Memastikan tidak ada tumpang-tindih rencana kegiatan.	mengelola data rencana kegiatan tahunan (Renta)

Tabel 9 Analisis CSF dan Identifikasi Kebutuhan SI (Prespektif Pembelajaran dan Pertumbuhan)

Sasaran	Kriteria Sukses	Tindakan CSF	Kebutuhan Sistem Informasi
Meningkatkan motivasi dan partisipasi pelaku PNPM di masyarakat desa/kelurahan dan meningkatkan kompetensi SDM baik di tingkat konsultan maupun masyarakat desa/kelurahan (Prespektif Pembelajaran dan Pertumbuhan)	Memberikan pelatihan bagi konsultan (korkab, askot dan fasilitator) yang dipandu oleh konsultan tingkat propinsi	1. Memastikan seluruh konsultan yang mendampingi desa/kelurahan PNPM telah mengikuti pelatihan dasar, madya dan utam. Serta mendapatkan sertifikat. 2. Memastikan Buku Pedoman PNPM dan modul pelatihan dimiliki oleh peserta.	Sistim Informasi Kepegawaian.
	Adanya pelatihan bagi BKM (Koordinator dan anggotanya) yang dipandu oleh konsultan kabupaten	1. BKM membantu mensosialisasikan PNPM dan dapat mengajak partisipasi swadaya warga masyarakat (terutama warga miskin dan perempuan), untuk mensukseskan pelaksanaan kegiatan PNPM, baik berupa swadaya tenaga, pikiran maupun dana. 2. Memastikan Buku Pedoman PNPM dan modul pelatihan dimiliki oleh	Sistim Informasi BKM dan KSM

Tabel 9 Analisis CSF dan Identifikasi Kebutuhan SI (Prespektif Pembelajaran dan Pertumbuhan)			
Sasaran	Kriteria Sukses	Tindakan CSF	Kebutuhan Sistem Informasi
		BKM.	
	Masyarakat desa/kelurahan melalui BKM dapat merubah status desa/kelurahannya dari status "tidak berdaya" menjadi "berdaya"	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat secara mandiri mengatasi akar penyebab kemiskinan dengan potensi sumber daya yang dimiliki di desa/kelurahannya. 2. Adanya kriteria penilaian BKM. 3. Mengaktifkan pertemuan atau koordinasi forum BKM dan Konsultan 4. Melakukan tanggapan dan perbaikan dengan cepat terhadap keluhan yang di sampaikan masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Informasi penilaian BKM. 2. Sistem Informasi pengaduan Masyarakat.

5. Analisis Portofolio Aplikasi

Analisis portofolio aplikasi dilakukan untuk mengevaluasi kebutuhan SI berdasarkan kontribusinya terhadap strategi bisnis dan dampaknya terhadap PNPM Mandiri Perkotaan khususnya dalam pengendalian pencairan dan penggunaan dana BLM.

1. Kuadran Pendukung (*Support Quadrant*)

No	Kebutuhan Sistem Informasi	Keterangan
1	Sistem Informasi Penilaian BKM	SI ini terdiri dari aplikasi untuk mengelola data penilaian kinerja BKM yang meliputi data partisipasi masyarakat dewasa, partisipasi warga miskin, partisipasi perempuan, data tingkat pengembalian pinjaman, data hasil audit dan data hasil sertifikasi pekerjaan.
2	Web-Site PNPM Kabupaten Bandung	Web-Site ini berguna untuk menyampaikan informasi progres pencairan dan penggunaan dana BLM yang bisa diakses oleh seluruh stakeholder seperti: Satker Kabupaten, pemda kecamatan, pemda desa/kelurahan, BKM dan KSM, serta perusahaan peserta channeling.

2. Kuadran Operasional (*Operational Quadrant*)

No	Kebutuhan Sistem Informasi	Keterangan
1	Sistem Informasi Kepegawaian	SI ini terdiri dari aplikasi untuk mengelola data pegawai konsultan PNPM Kabupaten, meliputi: data pribadi, pendidikan,

		pelatihan, pengalaman kerja, rotasi, mutasi, promosi dan degradasi.
2	Sistim Informasi Penggajian	SI ini terdiri dari aplikasi untuk mengelola gaji konsultan, meliputi: data kehadiran kerja, data penilaian kinerja konsultan, data grade honor dan data potongan.

3. Kuadran Potensi Tinggi (*High Potential Quadrant*)

Tabel 12. Daftar Aplikasi Potensi Tinggi		
No	Kebutuhan Sitem Informasi	Keterangan
1	Sistim Informasi Pengaduan Masyarakat	SI ini terdiri dari aplikasi untuk mengelola data keluhan dan respon yang telah dilakukan.
2	Sistim Informasi Channeling	SI ini terdiri dari aplikasi untuk mengelola data kemitraan, meliputi: data pihak swasta, data dinas-dinas pemberi bantuan dan data kabupaten pesaing.

4. Kuadran Stratejik (*Strategic Quadrant*)

Tabel 4.13 Daftar Aplikasi Strategis		
No	Kebutuhan Sitem Informasi	Keterangan
1	Sistim Informasi Pencairan BLM	SI ini terdiri dari aplikasi untuk mengelola data SPM dan SP2D sebagai bukti dana sudah diterima.
2	Sistim Informasi Penggunaan BLM	SI ini terdiri dari aplikasi untuk mengelola data proposal yang diajukan dan LPJ, meliputi: data RPD, RAB, Laporan penggunaan dana, data foto progres kegiatan

		0% - 50% - 100%, data titik kordinat lokasi kegiatan, data penerima manfaat dan data kegiatan yang diperbolehkan.
3	Sistim Informasi PJM	SI ini terdiri dari aplikasi untuk mengelola data rencana kegiatan tahunan (Renta), yang meliputi: data rencana kegiatan tahunan (T1, T2 dan T3).
4	Sistim Informasi BKM dan KSM	SI ini terdiri dari aplikasi untuk mengelola data BKM dan KSM meliputi: data potensi desa, data pembentukan BKM, data anggota BKM, data rekening BKM, data pagu BLM perdesa beserta nilai untuk Biaya Operasional (BOP), data pelatihan BKM dan data KSM.

Aplikasi portofolio ini sekaligus merupakan hasil akhir dari penelitian tesis ini yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas pengendalian penggunaan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) di Konsultan PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten Bandung.

STRATEGIC (Aplikasi Stratejik)	HIGH POTENTIAL (Aplikasi Potensial Tinggi)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistim Informasi Pencairan BLM. 2. Sistim Informasi Penggunaan BLM. 3. Sistim Informasi PJM 4. Sistim Informasi BKM dan KSM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistim Informasi Pengaduan Masyarakat. 2. Sistim Informasi Channeling.
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistim Informasi Kepegawaian. 2. Sistim Informasi Penggajian. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistim Informasi Penilaian BKM 2. Web-site PNPM Kabupaten Bandung
KEY OPERATIONAL (Aplikasi Operasional)	SUPPORT (Aplikasi Pendukung)

Tabel 4.14 *Blueprint* Portofolio Aplikasi PNPM MP Kabupaten Bandung

III. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis kondisi PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten Bandung (PNPM-MP) saat ini serta perumusan strategi sistem informasi untuk mendukung peningkatan kualitas pengendalian penggunaan dana bantuan langsung masyarakat, maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini :

1. PNPM-MP Kabupaten Bandung telah memiliki strategi bisnis dan acuan operasional proses bisnis di bidang program pemberdayaan masyarakat.
2. Hasil evaluasi terhadap proses bisnis saat ini menunjukkan PNPM-MP Kabupaten Bandung memerlukan sistem informasi untuk meningkatkan kinerja dan daya saingnya, karena sistem informasi yang ada saat ini hanya bersifat untuk entry data. Sehingga harus melakukan perencanaan strategis sistem informasi.
3. Perencanaan strategis sistem informasi PNPM-MP Kabupaten Bandung telah dilakukan melalui metodologi pepaduan strategik dan dampak kompetitif, dengan menggunakan alat bantu analisis seperti analisis *SWOT*, analisis *PEST*, *Balanced Score Card* dan *Critical Success Factor*.
4. Hasil akhir Perencanaan strategis sistem informasi ini adalah blueprint portofolio aplikasi untuk masa mendatang yang mengidentifikasi adanya kebutuhan sistem informasi yang meliputi 4 aplikasi strategis, 2 aplikasi operasional, 2 aplikasi pendukung, dan 2 aplikasi potensi tinggi.

2. Saran

Hal yang paling utama dalam perencanaan strategis sistem informasi adalah komitmen yang kuat dari pimpinan puncak organisasi untuk melakukan perubahan khususnya yang berhubungan dengan pengendalian penggunaan dana bantuan langsung masyarakat berbasis SIM.

Daftar Pustaka

- 1) Gordon Davis, Management Information Systems: Conceptual Foundation, Structure, and Development, Second Edition, Mc. Graw-Hill, Inc., 1984.
- 2) Iswara, Made Gde Yoga., Suchyo, Yudo Giri., Perencanaa Strategis Sistim Informasi Perusahaan Energi: Studi Kasus PT. XYZ, Universitas Indonesia, 2009
- 3) Jogiyanto H. M., Sistem Teknologi Informasi, Pendekatan Terintegrasi: Konsep Dasar, teknologi, Aplikasi, Pengembangan dan Pengelolaan., Andi Offset, Yogyakarta, 2003.
- 4) Kadir, Abdul., Pengenalan Sistem Informasi, Penerbit Andi Yogyakarta, 2003.
- 5) Laudon, Kenneth C and Laudon, Jane P., Management Information System – Managing The Digital System, Penerbit Salemba Empat, 2007.
- 6) Sumaryo, *Implementasi Participatory Rural Appraisal (PRA) dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Disampaikan dalam Pelatihan Pengorganisasian Masyarakat dalam rangka Peningkatan Mutu Pengabdian pada Masyarakat, di IAIN Raden Intan Bandar Lampung, 1991.
- 7) Ward, J. & Peppard J., Strategic Planning For Information System – third edition, John Wiley & Son, West Sussex, 2002.